

Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis UNS Ke 42 Tahun 2018

“Peran Keanekaragaman Hayati untuk Mendukung Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia”**Analisis Kebutuhan Penyuluh Pertanian Mendukung Jawa Tengah Menjadi Lumbung Pangan Nasional****Ahmad Wildani, Roostian Moordiani dan Sinta Widayani***Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Gatot Subroto Kompleks Tarubudaya Ungaran
Alamat email :rose_tean@yahoo.com***Abstrak**

Pembangunan pertanian dan perkebunan kedepan dihadapkan pada berbagai tantangan, perubahan iklim ekstrim, perubahan dan perkembangan lingkungan yang dinamis, kemajuan teknologi informasi yang pesat, terbatasnya modal petani serta masih lemahnya kelembagaan petani. Mendukung tercapainya pembangunan pertanian di Jawa Tengah diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang handal. Penyuluh mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan. Penyuluh juga harus mampu berperan sebagai fasilitator dan inisiator sehingga dapat menolong petani dan keluarganya.

Ketenagaan Penyuluhan di Provinsi Jawa tengah terdiri dari Penyuluh Pertanian (PP) PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Penyuluh Swadaya. Jumlahnya selalu berkurang dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian. Pengkajian ini bertujuan untuk 1) menganalisis kondisi PP PNS di Jawa Tengah; 2) menganalisis kondisi THL TBPP di Jawa Tengah; 3) menganalisis pelaksanaan tupoksi PP di Jawa Tengah. Hasil pengkajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengambil kebijakan berkaitan dengan pengadaan ketenagaan penyuluh pertanian, penyelenggaraan program peningkatan kapasitas SDM Penyuluh pertanian untuk mendukung tercapainya pembangunan pertanian. Pengkajian ini merupakan pengkajian deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder.

Hasil pengkajian diketahui bahwa jumlah penyuluh pertanian PNS di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun 2013 s/d 2017 berkurang sebanyak 622 orang atau 26,37%. Sedangkan selama Januari– Desember 2017 berkurang sebanyak 125 orang (14,64%). Jumlah THL TBPP di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun selalu berkurang, setiap tahun rata-rata 30 orang, karena diterima pekerjaan ditempat lain, berusaha sendiri, meninggal dunia. Tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pelaksanaan tupoksi dan kinerja THL TBPP. Jumlah wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) belum ideal, penyuluh rata-rata memiliki 2 wkpp dengan binaan kelompok 5 – 15 poktan dan 2 gapoktan. Tugas tambahan penyuluh lebih banyak dibandingkan dengan tupoksi sehingga pendampingan kelompok tidak maksimal.

Saran yang dapat disampaikan penulis antara lain : pengadaan formasi penyuluh pertanian PNS masih diperlukan disesuaikan dengan analisis kebutuhan penyuluh pada masing-masing kabupaten/kota. THL TBPP dengan usia diatas 35 tahun perlu mendapatkan perhatian menjadi ASN sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh baik PNS maupun THL TBPP diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Optimalisasi peran penyuluh swadaya untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan di lapangan melalui pelatihan dan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan.

Kata kunci: Penyuluhan, penyuluh

Pendahuluan

Pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Jawa Tengah memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional. Sumber daya pertanian dan perkebunan menjadi salah satu faktor penting dalam industri hulu dan hilir yang memberikan kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pertanian dan perkebunan kedepan dihadapkan pada berbagai tantangan berkaitan dengan perubahan iklim ekstrim, perubahan dan perkembangan lingkungan yang dinamis, kemajuan teknologi informasi yang pesat, terbatasnya modal petani serta masih lemahnya kelembagaan petani. Mendukung tercapainya pembangunan pertanian di Jawa Tengah diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang handal.

Penyuluh pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian karena paling dekat dengan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Penyuluh harus mampu menjadi fasilitator bagi petani untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan serta mau mengadopsi informasi teknologi yang disampaikan. Harapannya petani mampu mengakses modal dan pasar sehingga memecahkan permasalahannya dan meningkatkan pendapatan serta kehidupan yang lebih baik (Inten, *et al*, 2017).

Ketenagaan Penyuluhan di Provinsi Jawa tengah terdiri dari Penyuluh Pertanian (PP) PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Penyuluh Swadaya. Jumlah PP PNS per tanggal 6 Januari 2018 1.780 orang, THL-TBPP 2.505, Penyuluh Swadaya 5.175 orang. Jumlah penyuluh dari waktu ke waktu jumlahnya berkurang karena banyak yang memasuki masa purna tugas. Beberapa permasalahan yang akan dikaji adalah 1) bagaimana kondisi penyuluh di Jawa Tengah saat ini?; 2) bagaimana kondisi THL TBPP saat ini?; 3) bagaimana pelaksanaan tupoksi penyuluh saat ini?. Menjawab permasalahan yang ada maka tujuan dari pengkajian ini adalah 1) menganalisis kondisi PP PNS di Jawa Tengah; 2) menganalisis kondisi THL TBPP di Jawa Tengah; 3) menganalisis pelaksanaan tupoksi PP di Jawa Tengah.

Hasil pengkajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengambil kebijakan berkaitan dengan pengadaan ketenagaan penyuluh pertanian, penyelenggaraan program peningkatan kapasitas SDM Penyuluh pertanian untuk mendukung tercapainya pembangunan pertanian.

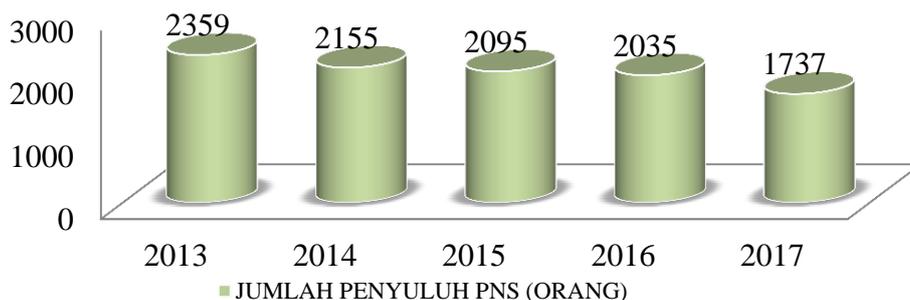
Metodologi

Pengkajian “Analisis Kebutuhan Penyuluh Pertanian Mendukung Jawa Tengah Menjadi Lumbung Pangan Nasional” merupakan pengkajian deskriptif, yaitu pengkajian mengenai suatu kondisi pada masa sekarang untuk digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang dikaji. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu catatan tentang suatu peristiwa dari sumber aslinya (Nasir, 2011).

Hasil dan Pembahasan

1. Keragaan Penyuluh Pertanian (PP) PNS Provinsi Jawa Tengah

Penyuluh pertanian mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Saat ini SDM penyuluh pertanian mengalami berbagai permasalahan antara lain adalah berkurangnya jumlah penyuluh dari waktu ke waktu tanpa ada penambahan SDM penyuluh pertanian baru. Keragaan jumlah PP PNS di Jawa Tengah rentang tahun 2013 – 2017 ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Keragaan Jumlah Penyuluh Pertanian PNS di Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

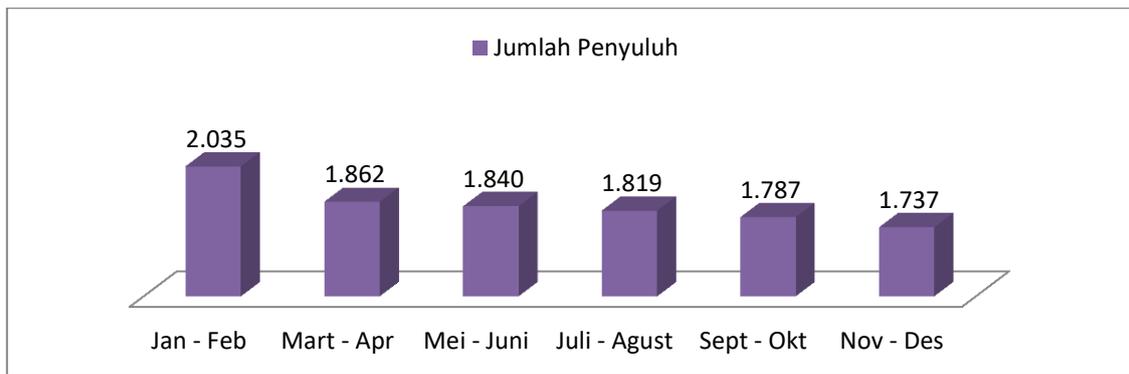
Permasalahan utama ketenagaan penyuluh pertanian adalah berkurangnya jumlah PP PNS dari tahun ketahun. Hal ini berdampak pada pembinaan dan pendampingan penyuluh kepada kelembagaan petani, pendampingan program pembangunan pertanian menjadi tidak efektif. Menurut Inten, et al (2017) penyuluh berperan sebagai pembimbing, pemantau, pengevaluasi, fasilitator dan konsultan dalam analisis usaha tani. Peran penting penyuluh dalam pemberdayaan petani tentunya masih sangat dibutuhkan, sehingga keberadaannya serta kecukupan jumlah penyuluh perlu mendapatkan perhatian. Jumlah PP PNS 5 tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah PP PNS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

TAHUN	JUMLAH PP PNS (ORANG)	PENGURANGAN JUMLAH (%)
2013	2.359	
2014	2.155	8,65
2015	2.095	2,78
2016	2.035	2,86
2017	1.737	14,64

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah penyuluh 5 tahun lalu sejumlah 2.359 orang. Setiap tahun mengalami pengurangan jumlah penyuluh karena memasuki masa purna tugas. Tahun 2014 berkurang 8,65% dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 berkurang 2,78% dan tahun 2016 berkurang 2,86%. Pengurangan jumlah terbanyak pada tahun 2017 yaitu 14,64%. Pengurangan keragaan jumlah penyuluh selama tahun 2013 s/d 2017 sebanyak 622 orang atau 26,37%. Tahun 2017 pengurangan jumlah PP PNS Provinsi Jawa Tengah tersaji pada tabel 2.



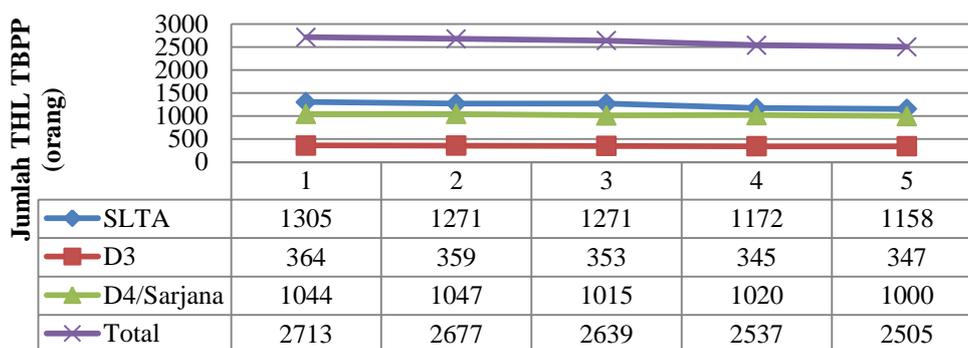
Gambar 2. Jumlah Penyuluh PNS di Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas jumlah PP pada awal tahun 2017 sejumlah 2.035 orang. Sebanyak 173 orang pensiun pada periode januari – februari 2017 sehingga pada periode maret – april 2017 tercatat jumlah penyuluh di Jawa Tengah sebanyak 1.862 orang. Periode mei – juni 2017 jumlah berkurang 22 orang, periode juli – agustus 2017 berkurang 21 orang, periode september – oktober 2017 berkurang 32 orang dan semakin berkurang pada periode november – desember 2017 sejumlah 50 orang. Penurunan jumlah PP PNS januari 2017 hingga desember 2017 sebanyak 298 orang (14,64%). Jumlah terbanyak berkurang adalah Kabupaten Blora dan Sragen masing-masing berkurang 19 orang pada tahun 2017. Namun ada beberapa Kabupaten yang jumlahnya bertambah yaitu Kabupaten Karanganyar, Temanggung, dan Kota Salatiga. Kabupaten/kota yang bertambah jumlah penyuluh karena dikembalikannya JFT (jabatan fungsional tertentu) pegawai yang semula formasi jabatan PP PNS pada JFU (jabatan fungsional umum).

Jumlah PP PNS berkurang paling besar karena memasuki masa purna tugas/pensiun, sebab lain karena tugas belajar, alih tugas menjadi pejabat struktural, sedangkan rekrutmen penyuluh pertanian baru tidak ada. Hal ini akan menjadi masalah pada proses pengawalan dan pendampingan kegiatan pertanian serta pemberdayaan petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian.

2. Keragaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP) Provinsi Jawa Tengah

Sejak Tahun 2007 Kementerian Pertanian merekrut lulusan pertanian baik SLTA, Diploma dan Sarjana sebagai tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL – TBPP). Jumlah THL TBPP Provinsi Jawa Tengah kurun waktu 2013 – 2017 ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Jumlah THL TBPP Periode 2013 – 2017 Provinsi Jawa Tengah

Jumlah THL TBPP dalam kurun waktu 5 tahun selaluberkurang, tercatat pada tahun 2013 berjumlah 2.713 orang. Penurunan jumlah THL TBPP setiap tahun rata-rata 30 orang, karena mendapatkan pekerjaan ditempat lain, berusaha sendiri, meninggal dunia. Berdasarkan jumlah THL TBPP menurut tingkat pendidikan diketahui SLTA lebih banyak dibandingkan dengan D3 dan D4/S1. Tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tupoksi sebagai seorang penyuluh. Pendidikan formal mempengaruhi kualitas dan kemampuan penyuluh menyelesaikan tugasnya, sehingga mempengaruhi kinerja penyuluh (Arifianto *et al*, 2017). Pada tahun 2017 THL TBPP yang berusia ≤ 35 tahun per september 2017 diusulkan menjadi CPNS melalui tes CAT sejumlah 710 orang. Sampai tahap akhir yang dinyatakan lulus 708 orang, dan tidak lulus 2 orang karena ijazah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, sehingga statusnya kembali menjadi THL TBPP. Per Juni 2017 jumlah THL TBPP 1.796 orang.

Menurut Permentan Nomor : 01/Permentan/OT.140/1/2008 THL TBPP mempunyai Tugas Pokok membantu Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan program penyuluhan kecamatan dan program penyuluhan pertanian desa. Peranan THL – TBPP menjadi amat strategis dalam melaksanakan tugas pendampingan dan konsultasi bagi petani dalam mengembangkan usaha agribisnisnya yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Sedangkan kondisi riil di lapangan THL TBPP memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dengan PP PNS. Hal ini disebabkan karena jumlah PP PNS semakin berkurang, sehingga mau tidak mau dipaksa untuk menggantikan dan berperan sebagaimana PP PNS. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas bagi THL TBPP sehingga memiliki kemampuan dalam menguasai materi, metoda, teknologi budidaya, panen, pascapanen dan pengolahan.

3. Kondisi Pelaksanaan Tupoksi PPdi Jawa Tengah

Swasembada dan swasembada berkelanjutan merupakan program Kementerian Pertanian yang harus didukung pencapaiannya, salahsatunya melalui penyuluhan. Menurut Sumintareja dalam Syahyuti (2014) asas pokok penyuluhan adalah “menolong petani agar ia mampu menolong dirinya sendiri”. Meningkatkan secara bertahap pengetahuan, kemampuan mendapatkan informasi dan mampu memecahkan masalah serta mengambil keputusan bijak bagi petani dan keluarganya

merupakan tujuan dari penyuluhan pertanian. Pentingnya peran penyuluh dalam pembangunan pertanian, maka perlu optimalisasi perannya terutama di tingkat kecamatan dan wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Jumlah penyuluh terus berkurang dan pengadaan penyuluh hampir tidak pernah ada menjadi permasalahan dalam pembangunan pertanian. Jumlah Penyuluh (PP PNS dan THL TBPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 per kabupaten/kota disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penyuluh (PP PNS dan THL TBPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH DESA	JUMLAH GAPOKTAN	JUMLAH POKTAN	PENYULUH PERTANIAN		JUMLAH	PENDAMPINGAN WKPP		
					PNS	THL		Desa	Gapoktan	Poktan
1	Cilacap	284	279	1952	77	85	162	2	2	12
2	Banyumas	331	331	1686	86	107	193	2	2	9
3	Purbalingga	239	239	1405	73	124	197	1	1	7
4	Banjarnegara	278	278	2481	70	94	164	2	2	15
5	Kebumen	460	460	1797	69	115	184	3	3	10
6	Purworejo	494	429	2333	65	116	181	3	2	13
7	Wonosobo	265	265	1380	73	89	162	2	2	9
8	Magelang	372	371	2793	95	150	245	2	2	11
9	Boyolali	267	264	2237	64	84	148	2	2	15
10	Klaten	401	400	1059	80	125	205	2	2	5
11	Sukoharjo	167	163	886	56	57	113	1	1	8
12	Wonogiri	294	291	2440	90	94	184	2	2	13
13	Karanganyar	177	177	1171	61	77	138	1	1	8
14	Sragen	208	205	1353	88	88	176	1	1	8
15	Grobogan	280	280	1602	61	49	110	3	3	15
16	Blora	295	295	1974	60	76	136	2	2	15
17	Rembang	294	276	1189	58	82	140	2	2	8
18	Pati	406	406	2208	80	100	180	2	2	12
19	Kudus	132	113	518	32	32	64	2	2	8
20	Jepara	195	183	1118	72	48	120	2	2	9
21	Demak	249	236	1130	55	56	111	2	2	10
22	Semarang	235	232	1907	71	94	165	1	1	12
23	Temanggung	289	285	2266	52	104	156	2	2	15
24	Kendal	286	283	877	56	72	128	2	2	7
25	Batang	248	244	975	46	64	110	2	2	9
26	Pekalongan	285	284	1160	45	77	122	2	2	10
27	Pemalang	222	163	869	66	56	122	2	1	7
28	Tegal	287	287	1507	87	77	164	2	2	9
29	Brebes	297	296	1663	64	84	148	2	2	11
30	Kota Magelang	17	8	18	4	0	4	4	2	5
31	Kota Surakarta	51	0	44	1	7	8	6	0	6
32	Kota Salatiga	23	22	156	9	4	13	2	2	12
33	Kota Semarang	177	50	368	13	14	27	7	2	14
34	Kota Pekalongan	27	14	73	6	2	8	3	2	9
35	Kota Tegal	27	10	64	12	2	14	2	1	5
JUMLAH		8559	8119	46659	1997	2505	4502	2	2	10

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan data diketahui bahwa di sebagian besar kabupaten/kota jumlah PP PNS lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah THL TBPP. Jika membandingkan antara jumlah desa dengan jumlah penyuluh maka rata-rata penyuluh memiliki 2 WKPP, bahkan ada yang memiliki 3 WKPP, dengan binaan kelompok tani 5 – 15 poktan dan 2 Gapoktan. Hal ini tidak sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan petani menyebutkan bahwa pendampingan penyuluh adalah 1 desa 1 penyuluh. Setiap Penyuluh Pertanian di WKPP dapat membina 8 - 16 Poktan, Gapoktan, dan KEP serta dijadwalkan mengunjungi setiap Poktan minimal sekali dalam dua minggu (Permentan 67 Tahun 2016). Kondisi ini tentunya menambah tugas yang harus diemban penyuluh. Oleh karena itu maka penguasaan materi, metode, teknologi budidaya, panen, pascapanen dan pengolahan serta penguasaan wilayah binaan harus dikuasai oleh penyuluh. Menurut Syahyuti (2014) fungsi utama penyuluh pertanian sebagai mata rantai (*change agent linkage*) antar pemerintah, sebagai *change agency* dengan masyarakat petani sebagai *client system*-nya. Agar dapat menjalankan tugasnya, seorang penyuluh harus menguasai metoda penyuluhan dengan baik serta mengerti sosiologi dan psikologi, dan paham pula ilmu dan teknologi pertanian.

Kondisi riil di lapangan penyuluh dituntut menjalankan tugas sejak mulai verifikasi dan penetapan CPCL kegiatan pertanian hingga evaluasi pelaksanaan kegiatan. Bahkan penyuluh dibebani pula dengan kegiatan administrasi keuangan (SPJ keuangan). Hal ini menambah beban tugas penyuluh, sehingga tidak jarang pendampingan penyuluh pada kelompok binaan menjadi tidak maksimal. Sistem Lakususi dalam kegiatan penyuluhan juga tidak berjalan dengan baik.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Jumlah penyuluh pertanian PNS di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun 2013 s/d 2017 berkurang sebanyak 622 orang atau 26,37%. Sedangkan selama Januari– Desember 2017 berkurang sebanyak 298 orang (14,64%).
2. Jumlah THL TBPP di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun selalu berkurang, setiap tahun rata-rata 30 orang, karena diterima pekerjaan ditempat lain, berusaha sendiri, meninggal dunia. Tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pelaksanaan tupoksi dan kinerja THL TBPP.
3. Jumlah wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) belum ideal, penyuluh rata-rata memiliki 2 WKPP dengan binaan kelompok 5 – 15 poktan dan 2 gapoktan. Tugas tambahan penyuluh lebih banyak dibandingkan dengan tupoksi sehingga pendampingan kelompok tidak maksimal.

Saran

1. Pengadaan formasi penyuluh pertanian PNS masih diperlukan, disesuaikan dengan analisis kebutuhan penyuluh pada masing-masing kabupaten/kota.

2. THL TBPP dengan usia diatas 35 tahun perlu mendapatkan perhatian menjadi ASN sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.
3. Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh pertanian baik PNS maupun THL TBPP melalui pelatihan dari instansi pemerintah penyelenggara diklat maupun OPD terkait menyelenggarakan bimbingan teknis sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Optimalisasi fungsi dan peran penyuluh swadaya di masing-masing kabupaten perlu ditingkatkan, salah satunya melalui pelatihan teknis dan fungsional bagi penyuluh swadaya, serta fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan bagi penyuluh swadaya.

Daftar Pustaka

- Arifianto, S, S. Satmoko, B.M. Setiawan. 2017. Pengaruh Karakteristik Penyuluh, Kondisi Kerja, Motivasi Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Dan Pada Perilaku Petani Padi Di Kabupaten Rembang. *J.Agrisociomics* 1(2): 159-173, November 2017.
- Inten S,M, D. Elviana, B.R. Nover. 2017. Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Komoditas Padi Di Kecamatan Tanjungseler Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. *J. Agrifor* 16 (1) : 103 - 108, Maret 2017.
- Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Jakarta.
- Kementerian Sekretari Negara RI. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta.
- Nazir. 2013. Metode Penelitian. Galia Indonesia. Bogor.
- Syahyuti. 2014. MAU INI APA ITU? Komparasi Konsep, Teori, dan Pendekatan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: (125 versus 125). PT. Nagakusuma Media Kreatif. Jakarta.